

2022

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PONTIANAK

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY
ATLAS (FSVA) KOTA PONTIANAK



DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	4
1.3. Metodologi	8
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN	14
2.1. Lahan Pertanian	14
2.2. Produksi	16
2.3. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	21
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	24
BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN	28
3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	28
3.2. Akses Transportasi	32
3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan	33
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN	35
4.1. Akses Terhadap Air Bersih	35
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	37
4.3. Dampak (Outcome) dari Status Kesehatan	39
4.3. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	42
BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	47
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	47
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	50
BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi PDRB Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2021	2
Tabel 1.2	Indikator FSVA Kabupaten 2022	9
Tabel 1.3	Bobot Indikator Individu	11
Tabel 2.1	Luas lahan Sawah Per Kelurahan di Kota Pontianak	15
Tabel 2.2	Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian	17
Tabel 2.3	Produksi Padi	18
Tabel 2.4	Produksi Ubi Kayu	19
Tabel 2.5	Produksi Ubi Jalar	20
Tabel 2.6	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan Berdasarkan Prioritas	21
Tabel 2.7	Produksi Tanaman Sayur	23
Tabel 2.8	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 2020-2024	24
Tabel 3.1	Prosentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Pontianak	29
Tabel 3.2	Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Prioritas	31
Tabel 3.3	Sebaran Kelurahan dengan Akses Transportasi Berdasarkan Prioritas	32
Tabel 4.1	Sebaran Kelurahan dengan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Prioritas	36
Tabel 4.2	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Prioritas	38
Tabel 4.3	Penderita Gizi Buruk	40
Tabel 4.4	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan	41
Tabel 5.1	Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas	47
Tabel 6.2	Target Kinerja RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	6
Gambar 2.1	Grafik Luas Lahan Sawah Per Kelurahan di Kota Pontianak	16
Gambar 2.2	Grafik Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian	17
Gambar 2.3	Grafik Produksi Padi	18
Gambar 2.4	Grafik Produksi Ubi Kayu	19
Gambar 2.5	Grafik Produksi Ubi Jalar	20
Gambar 2.6	Grafik Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan Berdasarkan Prioritas	22
Gambar 3.1	Grafik Prosentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Pontianak	29
Gambar 3.2	Grafik Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Prioritas	31
Gambar 4.1	Grafik Sebaran Kelurahan dengan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Prioritas	37
Gambar 4.2	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Prioritas	38
Gambar 4.3	Grafik Penderita Gizi Buruk	40
Gambar 4.4	Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan	41
Gambar 5.1	Grafik Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas	49
Gambar 6.1	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peta Rasio Jumlah Sarana Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga	57
Lampiran 2	Peta Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk	58
Lampiran 3	Peta Kelurahan/Kecamatan yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai	59
Lampiran 4	Peta Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga	50
Lampiran 5	Peta Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk	61
Lampiran 6	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Komposit)	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten/Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kelurahan. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk; (2) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (2) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Untuk wilayah perkotaan, dalam penyusunan FSVA Tahun 2022 indikator Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk tidak dimasukkan dalam analisis.

5. Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Berdasarkan hasil analisis tersebut secara komposit, dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 1 Kelurahan yakni Kelurahan Tanjung Hilir (Kecamatan Pontianak Timur) masuk dalam prioritas 1.
 - b. Sebanyak 1 Kelurahan yakni Kelurahan Batulayang (Kecamatan Pontianak Utara) masuk dalam prioritas 2.
 - c. Sebanyak 6 Kelurahan yakni Kelurahan Parit Mayor, Banjar Serasan, dan Dalam Bugis (Kecamatan Pontianak Timur) masuk dalam prioritas 3.
 - d. Sebanyak 15 Kelurahan yakni Benua Melayu Laut, Parit Tokaya, Kota Baru (Kecamatan Pontianak Selatan), Bangka Belitung Laut, Bansir Darat (Kecamatan Pontianak Tenggara), Saigon, Tanjung Hulu, Tambelan Sampit (Kecamatan Pontianak Timur), Pallima, Sungai Jawi Dalam (Kecamatan Pontianak Barat), Tengah, Mariana, Sungai Jawi (Pontianak Kota), dan Siantan Hilir, Siantan Tengah (Kecamatan Pontianak Utara) masuk dalam prioritas 4.
 - e. Sebanyak 5 Kelurahan yakni Benua Melayu Darat, dan Akcaya (Kecamatan Pontianak Selatan), Bangka Belitung Darat dan Bansir Laut (Kecamatan Pontianak Tenggara), Kelurahan Sungai Bangkong (Kecamatan Pontianak Kota) masuk dalam prioritas 5.
 - f. Sebanyak 1 Kelurahan yakni Darat Sekip (Kecamatan Pontianak Kota) masuk dalam prioritas 6.
7. Hasil analisis per indikator, dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Indikator Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga : Kelurahan prioritas 1 meliputi 5 Kelurahan yakni Parit Tokaya dan Kota Baru (Kecamatan Pontianak Selatan), Sungai Jawi Luar (Kecamatan Pontianak Barat), Kelurahan Batulayang dan Siantan Hulu (Kecamatan Pontianak Utara). Kelurahan prioritas 2 meliputi 8 Kelurahan yakni Bangka Belitung Laut (Kecamatan Pontianak

Selatan), Parit Mayor, Banjar Serasan, Saigon, dan Tanjung Hilir (Kecamatan Pontianak Utara), Pallima dan Sungai Beliang (Kecamatan Pontianak Barat), Sungai Jawi (Kecamatan Pontianak Kota). Kelurahan prioritas 3 meliputi 2 Kelurahan yakni Benua Melayu Laut (Kecamatan Pontianak Selatan), Tanjung Hulu (Kecamatan Pontianak Timur).

- b. Indikator Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk : Kelurahan prioritas 1 meliputi 10 Kelurahan yakni Banjar Serasan, Saigon, Tanjung Hulu, Tanjung Hilir, Dalam Bugis, dan Tambelan Sampit (Kecamatan Pontianak Timur), Sungai Beliang (Kecamatan Pontianak Barat), Tengah (Kecamatan Pontianak Kota), Bansir Laut (Kecamatan Pontianak Tenggara), dan Siantan Tengah (Kecamatan Pontianak Utara). Kelurahan prioritas 2 meliputi 3 Kelurahan yakni Sungai Jawi Luar (Pontianak Barat), Siantan Hilir, dan Siantan Hulu (Kecamatan Pontianak Utara), Kelurahan prioritas 3 meliputi 9 Kelurahan yakni Parit Tokaya dan Kota Baru (Kecamatan Pontianak Selatan), Bangka Belitung Laut, Bansir Laut, dan Bansir Darat (Kecamatan Pontianak Tenggara), Parit Mayor (Kecamatan Pontianak Timur), Darat Sekip, Mariana dan Sungai Jawi (Kecamatan Pontianak Kota).
- c. Indikator Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara : Kelurahan prioritas 3 meliputi 2 Kelurahan yakni Batulayang dan Siantan Hulu (Kecamatan Pontianak Utara).
- d. Indikator Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga : Kelurahan prioritas 1 meliputi 6 Kelurahan yakni Parit Mayor, Tanjung Hilir, Dalam Bugis, Tambelan Sampit (Kecamatan Pontianak Timur), Tengah (Kecamatan Pontianak Kota), Bansir Laut (Kecamatan Pontianak Tenggara). Kelurahan prioritas 2 meliputi 7 Kelurahan yakni Banjar Serasan, dan Saigon (Kecamatan Pontianak Timur), Sungai Jawi Luar, dan Sungai Beliang (Kecamatan Pontianak Barat), Siantan Hilir, Siantan Tengah, dan Siantan Hulu (Kecamatan Pontianak Utara). Kelurahan prioritas 3 meliputi 3 Kelurahan yakni Pallima (Kecamatan Pontianak Barat), Darat Sekip, dan Mariana (Kecamatan Pontianak kota).
- e. Indikator Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk : Kelurahan prioritas 1 meliputi 5 Kelurahan yakni Kota Baru (Kecamatan Pontianak Selatan), Tanjung Hilir (Kecamatan Pontianak Timur), Sungai Jawi (Kecamatan Pontianak Kota), Bansir Laut (Kecamatan Pontianak Tenggara), dan Siantan Hilir (Kecamatan

Pontianak Utara). Kelurahan prioritas 2 meliputi 4 Kelurahan yakni Bansir Darat (Kecamatan Pontianak Tenggara), Pallima (Kecamatan Pontianak Barat), Siantan Tengah dan Siantan Hulu (Kecamatan Pontianak Utara). Kelurahan prioritas 3 meliputi 6 Kelurahan yakni Parit Tokaya dan Parit Mayor (Kecamatan Pontianak Selatan), Saigon dan Tanjung Hulu (Kecamatan Pontianak Timur), Sungai Jawi Dalam dan Sungai Jawi Luar (Kecamatan Pontianak Barat).

8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan diarahkan pada kegiatan:

A. Mengatasi masalah ketersediaan pangan, diantaranya :

- a. Meningkatkan kapasitas produksi per satuan luas lahan, antara lain dengan meningkatkan indeks pertanaman.
- b. Mengembangkan potensi lahan pertanian non sawah.
- c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana khususnya tanaman pangan.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman umbi-umbian dan sayuran.
- e. Penguatan cadangan pangan daerah.
- f. Peningkatan diversifikasi pangan.
- g. Melakukan pemantauan harga dan stok pangan dalam upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

B. Mengatasi masalah akses pangan, diantaranya :

- a. Penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.
- b. Pengembangan usaha kreatif, terutama di sektor informal, UMKM, padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- c. Mempermudah akses pangan, diantaranya melalui operasi pasar di titik-titik lokasi terindikasi potensi rawan pangan.
- d. Jaringan pengaman sosial rumah tangga miskin, diantaranya efektifitas cakupan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program sosial lainnya.

C. Mengatasi masalah infrastruktur (air bersih), diantaranya :

- a. Peningkatan infrastruktur dasar air bersih, dengan memperluas jaringan air bersih PDAM.
- b. Memberikan subsidi bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitasi pemasangan instalasi air bersih.

- D. Mengatasi masalah kesehatan dan gizi, diantaranya :
 - a. Memperkuat sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi.
 - b. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan gizi.
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan pangan dan gizi.
 - d. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap kelurahan.
 - e. Meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan.

- 9. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan gizi terutama diprioritaskan pada wilayah kelurahan prioritas 1 sampai 3 sehingga upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi dapat fokus pada lokasi sasaran yang sudah teridentifikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Pontianak terdiri dari 6 kecamatan dan 29 Kelurahan dengan total penduduk pada tahun 2021 sebesar 672.440 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, 2021). Kota Pontianak secara astronomis terletak antara 0° 02' 24" lintang utara dan 0° 05' 37" lintang selatan dan antara 109° 16' 25" bujur timur sampai dengan 109° 23' 01" bujur timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini Kota Pontianak tepat berada di garis khatulistiwa. Kota Pontianak di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, yang memiliki wilayah daratan seluas 107,82 km² atau 11.296 ha.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2021 mencapai 40,20 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Pontianak pada tahun 2021 mengalami peningkatan.

Distribusi persentase PDRB Kota Pontianak atas dasar harga berlaku selama 3 tahun terakhir disajikan pada table 1 berikut ini :

Tabel 1.1
Distribusi Persentase PDRB Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2019 – 2021

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1.	Pertanian Perikanan dan Kehutanan	1,27	1,40	1,35
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
3.	Indutri Pengolahan	17,35	17,98	18,16
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,17	0,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,34	0,34
6.	Konstruksi	16,03	16,12	16,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	17,63	15,71	15,66
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,62	7,92	7,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,50	2,93	3,01
10.	Informasi dan Komunikasi	4,74	5,72	5,74
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	8,85	9,11
12.	Real Estat	2,43	2,51	2,37
13.	Jasa Perusahaan	0,68	0,67	0,63
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,06	9,83	9,28
15.	Jasa Pendidikan	6,23	5,68	5,69
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,68	2,62	3,40
17.	Jasa Lainnya	1,87	1,54	1,37
PDRB		100	100	100

(Sumber : BPS, 2021).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2021.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih

baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

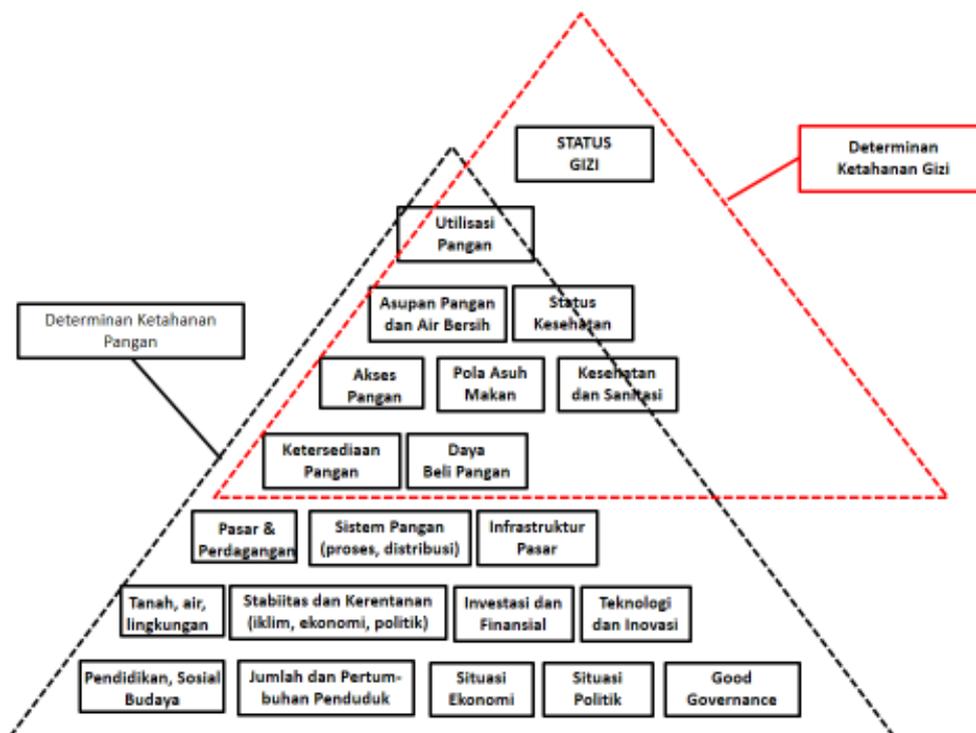
Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak

dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.2. Indikator FSVA Kota Pontianak 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk kelurahan	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2021
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa/ kelurahan	Potensi Desa 2021 (BPS)
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Data Penduduk Desil 1 Kota Pontianak Tahun 2021, Dinas Sosial Kota Pontianak
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara dengan kriteria: (1) Dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll); (3) Dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun.	Potensi Desa, BPS, 2021

Indikator	Definisi	Sumber Data
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	BPS, 2021
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari : 1) tenaga medis; 2) tenaga keperawatan; 3) tenaga kebidanan; dan 4) tenaga gizi, dibandingkan dengan kepadatan penduduk kelurahan	Potensi Desa, BPS Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2021

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda,

maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- a_i : Bobot masing-masing indikator
- X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.3. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/3
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6

Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian/lahan sawah jumlah penduduk wilayah kelurahan. Rasio lahan sawah terhadap jumlah penduduk wilayah kelurahan digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap jumlah penduduk wilayah kelurahan maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam

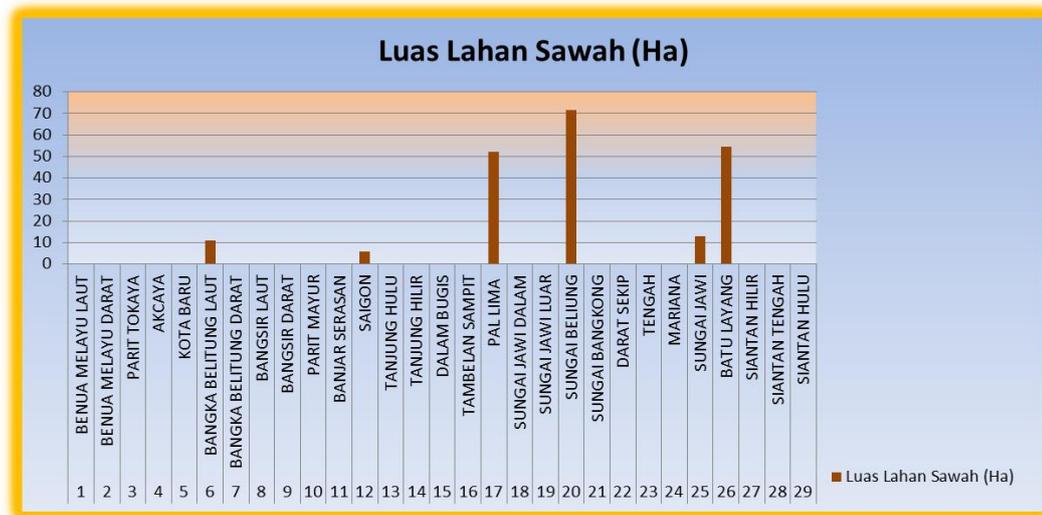
petunjuk teknis penyusunan FSVA tahun 2022, dalam penyusunan FSVA tahun 2022 ini ratio luas lahan pertanian/lahan sawah terhadap jumlah penduduk wilayah kelurahan tidak dimasukkan dalam indikator penghitungan/penyusunan FSVA wilayah perkotaan. Berdasarkan data BPN Kota Pontianak Tahun 2020, luas lahan sawah di Kota Pontianak seluas 207,64 Ha, dengan rincian sebagaimana table 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Luas Lahan Sawah Per Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Lahan Sawah (Ha)
1	PONTIANAK SELATAN	BENUA MELAYU LAUT	0.00
2	PONTIANAK SELATAN	BENUA MELAYU DARAT	0.00
3	PONTIANAK SELATAN	PARIT TOKAYA	0.00
4	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	0.00
5	PONTIANAK SELATAN	KOTA BARU	0.00
6	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG LAUT	11.02
7	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG DARAT	0.00
8	PONTIANAK TENGGARA	BANGSIR LAUT	0.00
9	PONTIANAK TENGGARA	BANGSIR DARAT	0.00
10	PONTIANAK TIMUR	PARIT MAYUR	0.00
11	PONTIANAK TIMUR	BANJAR SERASAN	0.00
12	PONTIANAK TIMUR	SAIGON	5.72
13	PONTIANAK TIMUR	TANJUNG HULU	0.00
14	PONTIANAK TIMUR	TANJUNG HILIR	0.00
15	PONTIANAK TIMUR	DALAM BUGIS	0.00
16	PONTIANAK TIMUR	TAMBELAN SAMPIT	0.00
17	PONTIANAK BARAT	PAL LIMA	52.00
18	PONTIANAK BARAT	SUNGAI JAWI DALAM	0.00
19	PONTIANAK BARAT	SUNGAI JAWI LUAR	0.00
20	PONTIANAK BARAT	SUNGAI BELIUNG	71.42
21	PONTIANAK KOTA	SUNGAI BANGKONG	0.00
22	PONTIANAK KOTA	DARAT SEKIP	0.00
23	PONTIANAK KOTA	TENGAH	0.00
24	PONTIANAK KOTA	MARIANA	0.00
25	PONTIANAK KOTA	SUNGAI JAWI	13.08
26	PONTIANAK UTARA	BATU LAYANG	54.40
27	PONTIANAK UTARA	SIANTAN HILIR	0.00
28	PONTIANAK UTARA	SIANTAN TENGAH	0.00
29	PONTIANAK UTARA	SIANTAN HULU	0.00

Sumber : BPN Kota Pontianak, 2022.

Gambar 2.1
Grafik Luas Lahan Sawah Per Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2021



2.2. PRODUKSI

Tanaman pangan merupakan subsektor yang sangat penting bagi masyarakat, karena merupakan makanan pokok penduduk. Kota Pontianak sebagai wilayah perkotaan memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan terutama beras karena terbatasnya areal pertanian tanaman pangan di Kota Pontianak. Oleh karenanya Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya melakukan berbagai langkah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok di Kota Pontianak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan produktivitas lahan yang ada serta membangun sinergitas dengan semua stakeholders dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan pokok di Kota Pontianak.

Pemerintah Kota Pontianak telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) memberikan kontribusi sebesar 1,35 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak

pada tahun 2021, dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta dinamika pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.2
Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017- 2021 (Ton)

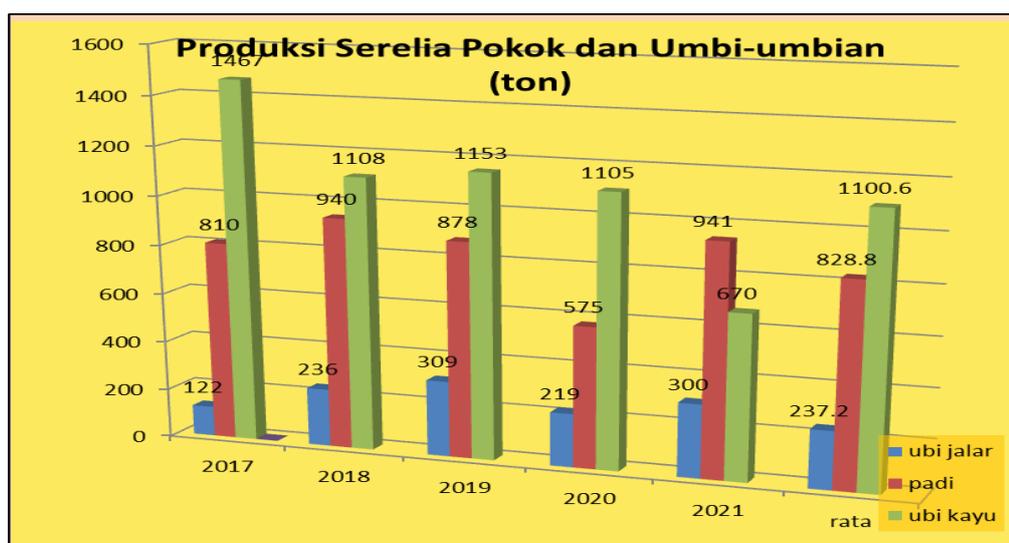
Serealia	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata 5 tahun
Padi	810	940	878	575	941	829
Ubi Kayu	1.467	1.108	1.153	1.105	670	1.100
Ubi Jalar	122	236	309	219	300	237

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2022.

Tahun 2021, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai : 941 ton padi, ubi kayu 670 ton dan ubi jalar 286 ton.

Rata-rata produksi padi tahun 2017-2021 sebanyak 829 ton. Rata-rata produksi ubi kayu tahun 2017-2021 sebanyak 1.102 ton, sedangkan ubi jalar rata-rata produksinya dari tahun 2017-2021 sebanyak 237 ton.

Gambar 2.2
Grafik Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2017- 2021



Padi

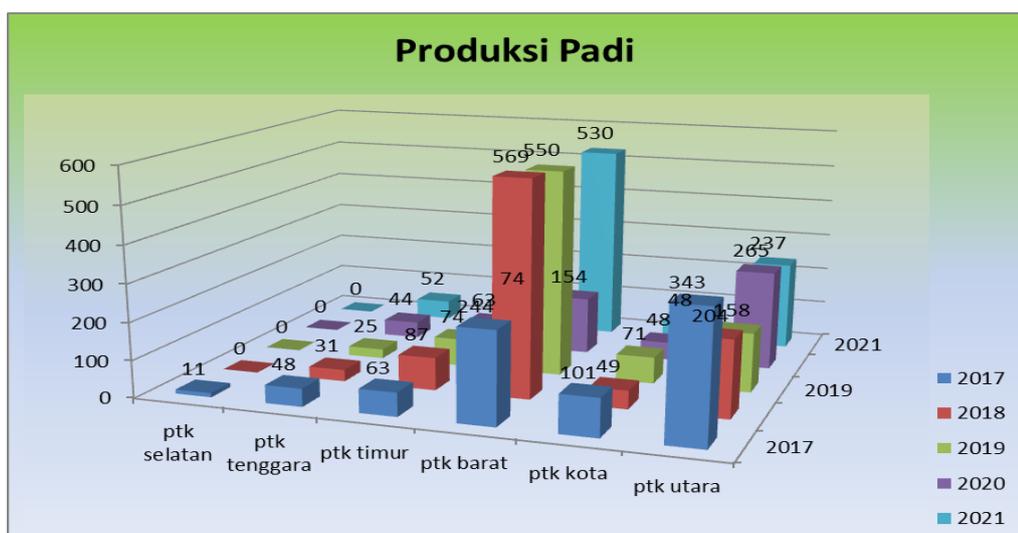
Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kota Pontianak selama 5 tahun terakhir (2017-2021) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.3. Produksi padi mengalami fluktuasi pada tahun 2017 – 2021, dimana ada Kecamatan yang mengalami peningkatan produksi namun ada pula yang mengalami penurunan produksi. Produksi padi di Kota Pontianak pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 38,89 % dibandingkan tahun 2020 yakni dari 575 ton pada tahun 2020 menjadi 941 ton pada tahun 2021.

Tabel 2.3
Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pontianak Selatan	11	0	0	0	0
2. Pontianak Tenggara	48	31	25	44	52
3. Pontianak Timur	63	87	74	63	74
4. Pontianak Barat	244	569	550	154	530
5. Pontianak Kota	101	49	71	48	48
6. Pontianak Utara	343	204	158	265	237
Jumlah	810	940	878	575	941

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2022.

Gambar 2.3
Grafik Produksi Padi Kota Pontianak 2017- 2021 (Ton)



Ubi Kayu

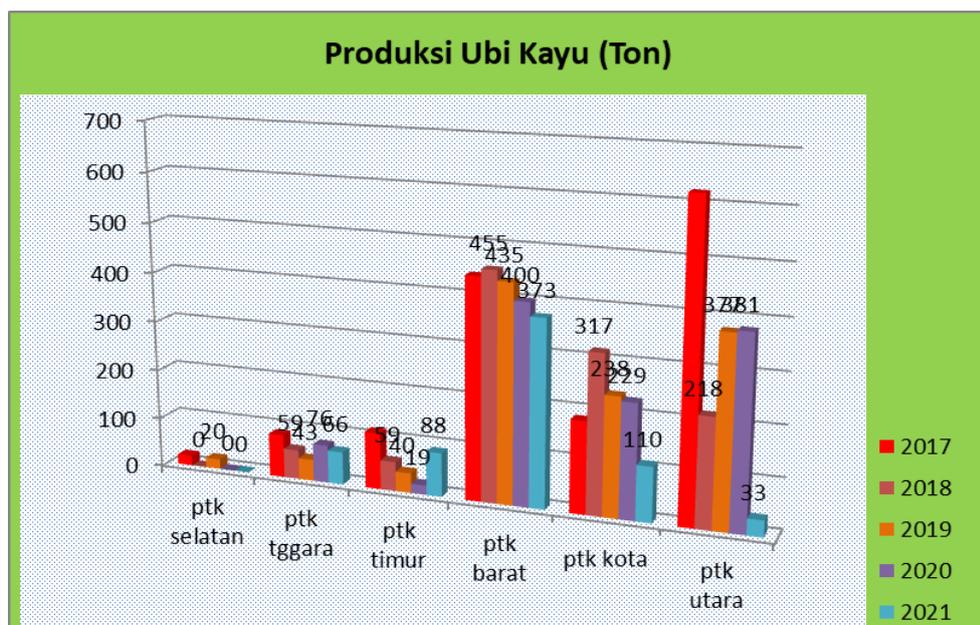
Produksi ubi kayu dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Rincian produksi ubi kayu tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.4. Produksi ubi kayu di Kota Pontianak pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 64,93 % dibandingkan tahun 2020 yakni dari 1.105 ton pada tahun 2020 menjadi 670 ton pada tahun 2021.

Tabel 2.4
Produksi Ubi Kayu 2017 – 2021 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pontianak Selatan	20	0	20	0	0
2. Pontianak Tenggara	87	59	43	76	66
3. Pontianak Timur	114	59	40	19	88
4. Pontianak Barat	441	455	435	400	373
5. Pontianak Kota	184	317	238	229	110
6. Pontianak Utara	621	218	377	381	33
Jumlah	1.467	1.108	1.153	1.105	670

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2022.

Gambar 2.4
Grafik Produksi Ubi Kayu 2017- 2021 (Ton)



Ubi Jalar

Produksi ubi kayu dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Rincian produksi ubi jalar tahun 2017 - 2021 disajikan pada Tabel 2.5.

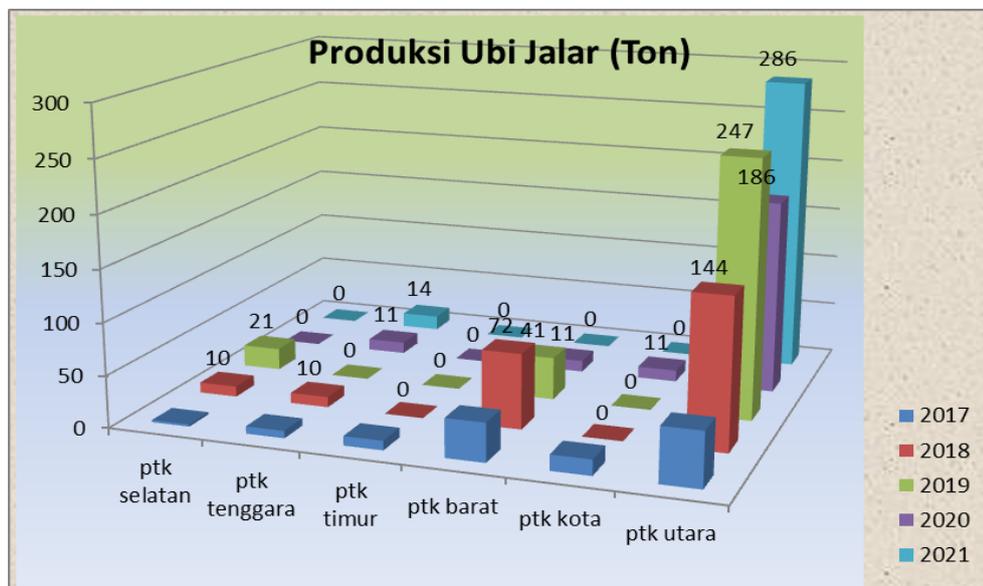
Produksi ubi layu di Kota Pontianak pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 27,00 % dibandingkan tahun 2020 yakni dari 219 ton pada tahun 2020 menjadi 300 ton pada tahun 2021.

Tabel 2.5
Produksi Ubi Jalar 2017 - 2021 (Ton)

Kabupaten	Ubi jalar				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pontianak Selatan	2	10	21	0	0
2. Pontianak Tenggara	7	10	0	11	14
3. Pontianak Timur	9	0	0	0	0
4. Pontianak Barat	37	72	41	11	0
5. Pontianak Kota	15	0	0	11	0
6. Pontianak Utara	52	144	247	186	286
Jumlah	122	236	309	219	300

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2022.

Gambar 2.5
Grafik Produksi Ubi Jalar 2017- 2021 (Ton)



2.3. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

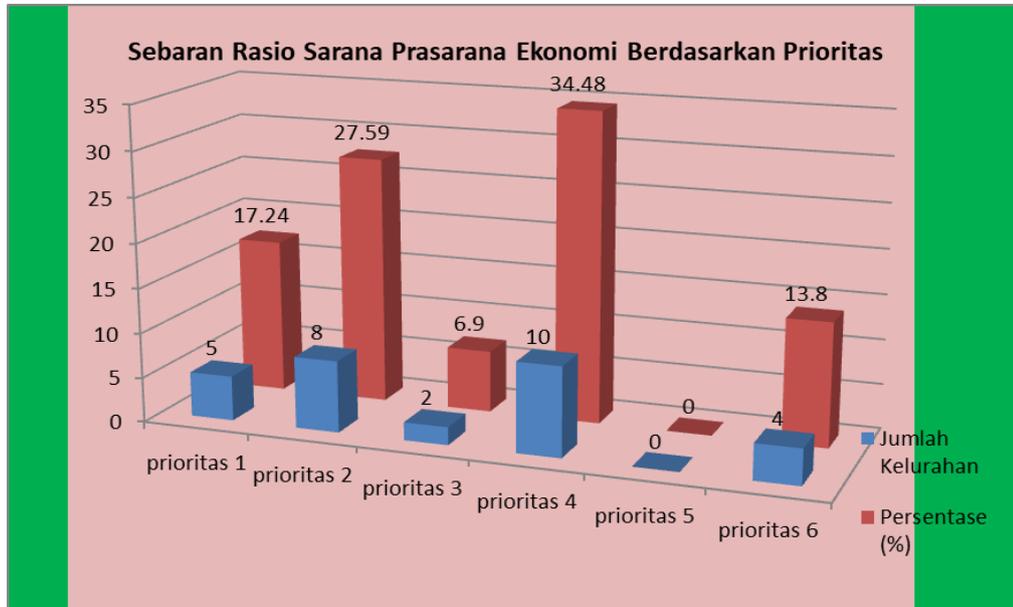
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dibandingkan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut.

Dari 29 Kelurahan di Kota Pontianak, sebanyak 5 kelurahan masuk dalam prioritas 1, sebanyak 8 Kelurahan prioritas 2 dan sebanyak 2 Kelurahan prioritas 3. Rincian sebaran ratio sarana dan prasarana penyedia pangan berdasarkan prioritas disajikan pada table 2.6.

Tabel 2.6
Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
1	5	Parit Tokaya, Kota Baru, Sungai Jawi Luar, Batulayang, Siantan Hulu.
2	8	Bangka Belitung Laut, Parit Mayor, Banjar Serasan, Saigon, Tanjung Hilir, Pallima, Sungai Beliung, Sungai Jawi.
3	2	Benua Melayu Laut, Tanjung Hulu.
4	10	Benua Melayu Darat, Akcaya, Bangka Belitung Darat, Bansir Laut, Bansir Darat, Dalam Bugis, Sungai Jawi Dalam, Tengah, Mariana, Siantan Tengah.
5	0	-
6	4	Tambelan Sampit, Sungai Bangkong, Darat Sekip, Siantan Hilir.

Gambar 2.6
Grafik Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan
Berdasarkan Prioritas



2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak rata-rata per tahun mencapai 1,02 %. Sementara itu produksi padi pada tahun 2021 sebesar 941 ton meningkat sebanyak 366 ton (38,39 %) dibandingkan tahun 2020 dimana produksinya sebesar 575 ton. Tanaman ubi jalar pada tahun 2021 produksinya sebesar 300 ton, meningkat sebanyak 81 ton (27,00 %) dibandingkan tahun 2020 yang produksinya 219 ton. Sedangkan tanaman ubikayu pada tahun 2021 mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 435 ton (64,93 %), yakni dari produksi sebesar 1.105 ton pada tahun 2020 menjadi 670 pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis Pola Konsumsi Pangan tahun 2022, rata-rata konsumsi beras di Kota Pontianak sebesar 74,6 Kg/Perkapita/Tahun. Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk Kota

Pontianak tersebut, hasil produksi padi dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. Kota Pontianak merupakan wilayah perkotaan yang memiliki lahan tanaman pangan yang sangat terbatas. Pada tahun 2021 tercatat luas tanaman padi di Kota Pontianak sebesar 207 hektar. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 luas lahan tanaman padi tersebut mengalami penurunan sebesar 14 hektar atau 6 persen. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga persediaan pangan terutama beras di Kota Pontianak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain koordinasi ketersediaan stok beras, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengembangan diversifikasi pangan.

Disamping dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan dan pengembangan komoditi sayuran juga dilakukan dalam upaya penyediaan bahan pangan yang beranekaragam untuk dikonsumsi masyarakat. Komoditi sayuran tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketersediaan bahan pangan khususnya sayuran di Kota Pontianak dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.7
Produksi Tanaman Sayur 2019-2021 (Kuintal)

Tanaman Sayuran	2019	2020	2021	Rata-Rata 3 Tahun
Bayam	11.230	10.702	9.556	10.496
Jamur	13.812	14.935	27.028	18.592
Kangkung	25.095	21.044	19.859	21.999
Ketimun	4.739	6.262	4.225	5.075
Sawi	12.961	14.474	14.320	13.918
Terung	5.227	6.174	2.159	4.520
Tomat	3.509	3.333	3.485	3.442

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, BPS 2022

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak mengenai ketersediaan pangan pada periode 2020 - 2024 bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan sektor pertanian dan perikanan. Strategi untuk masing-masing tujuan sebagaimana Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 2020 - 2024

Visi	Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Cerdas dan Bermartabat.		
Misi I	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.		
<u>Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Strategi</u>	<u>Arah Kebijakan</u>
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Meningkatnya Ketahanan Pangan.	Meningkatnya Ketersediaan Distribusi dan Keanekaragaman Pangan.	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Bahan Pangan serta Menjamin Mutu dan Keamanan Pangan.
Misi 4	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, Kreatif, dan Berdaya Saing.		
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, dan Produksi Tanaman Hortikultura.	Meningkatkan Ketersediaan Pengamanan Pangan.	Memberikan Bantuan dan Pendampingan serta Bantuan Kegiatan Pertanian.
		Meningkatkan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura	Menyediakan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura.

		Berkelanjutan.	
		Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian.	Menyediakan Bahan Prasarana dan Sarana Pertanian.
		Meningkatkan Kualitas Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Meningkatkan Pelayanan UPT Agribisnis.
		Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan Petani.	Mengadakan Pelatihan Kepada Petani.
		Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian.	Pembentukan dan Pengukuhan Kelompok Tani.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan;
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan gizi;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan :
 - a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - c. Pengelolaan Pembudidaya Ikan;
 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - b. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Prasarana Pertanian;

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan :
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknik Kesejahteraan Hewan;

9. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian;

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu : (1) jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana transportasi darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun ke tahun jumlahnya cukup berfluktuatif. Pada tahun 2021, BPS Kota Pontianak mencatat ada sekitar 4,58 % penduduk miskin di Kota Pontianak, dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin per kapita per bulannya dibawah garis kemiskinan sebesar Rp. 578.615,-. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Pontianak. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk

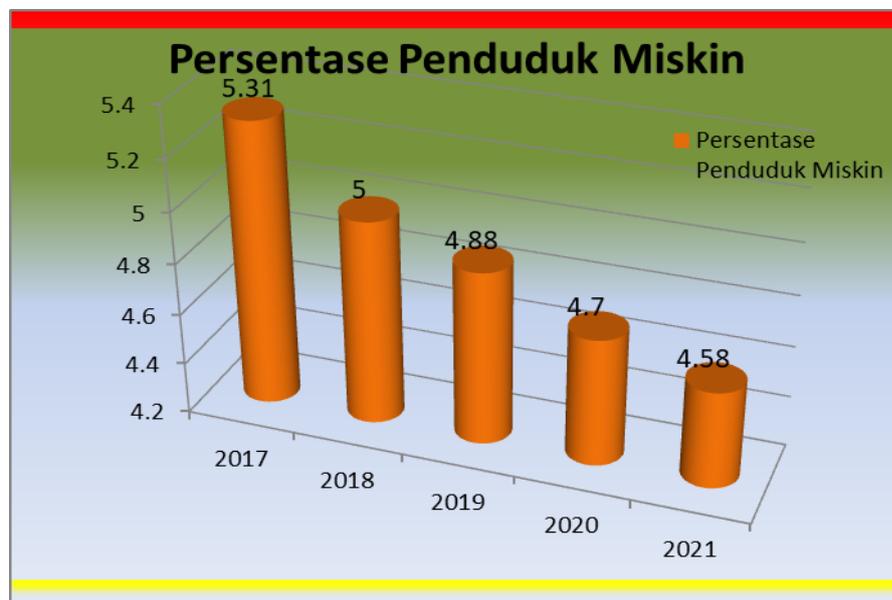
miskin Kota Pontianak terus mengalami penurunan dari 5,55 % tahun 2016 menjadi 4,58 % tahun 2021.

Tabel 3.1
Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Pontianak

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin	5,31	5,00	4,88	4,70	4,58

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, BPS 2022

Gambar 3.1
Grafik Persentase Populasi Penduduk Miskin Kota Pontianak



Pada tingkat kelurahan berdasarkan data Data Penduduk Desil 1 Kota Pontianak Dinas Sosial Kota Pontianak 2020, terdapat 10 Kelurahan yang

memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah Prioritas 1. Sebanyak 3 Kelurahan masuk prioritas 2, dan 9 Kelurahan masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota Pontianak ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di Kelurahan Prioritas tersebut.

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial seperti kemiskinan. Masyarakat dengan masalah sosial seperti tersebut memerlukan penanganan yang sinergi dan komprehensif.

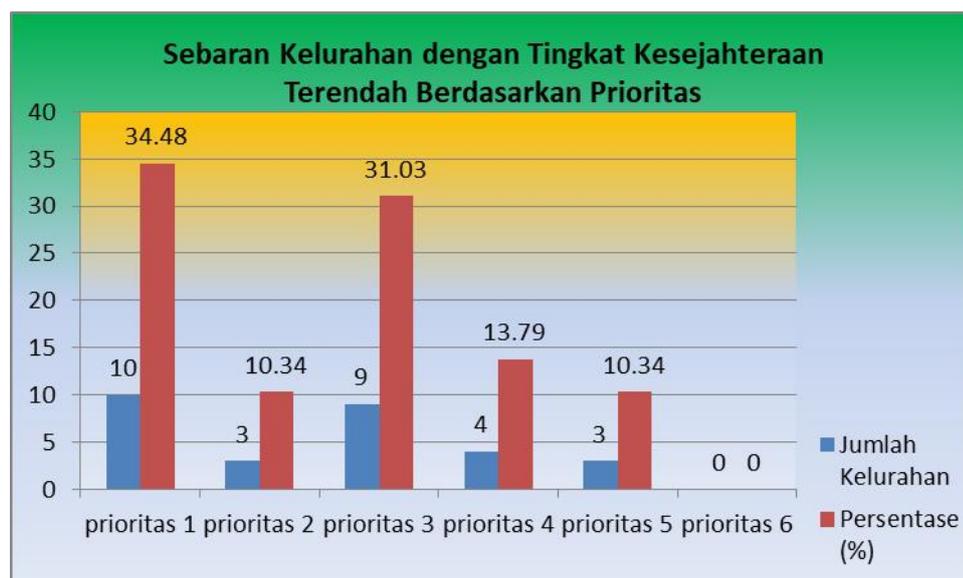
Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Adapun tujuan dari pelayanan urusan sosial di Kota Pontianak adalah untuk menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang salah satunya adalah kemiskinan.

Tabel 3.2
Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah
Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
1	10	Banjar Serasan, Saigon, Tanjung Hulu, Tanjung Hilir, Dalam Bugis, Tambelan Sampit, Sungai Beliang, Tengah, Batulayang, Siantan Tengah.
2	3	Sungai Jawi Luar, Siantan Hilir, Siantan Hulu.
3	9	Parit Tokaya, Kota Baru, Bangka Belitung Laut, Bansir Laut, Bansir Darat, Parit Mayor, Darat Sekip, Mariana, Sungai Jawi.
4	4	Benua Melayu Laut, Pallima, Sungai Jawi Dalam, Sungai Bangkong.
5	3	Benua Melayu Darat, Akcaya, Bangka Belitung Darat.
6	0	-

Gambar 3.2

Grafik Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah
Berdasarkan Skala Prioritas



3.2 AKSES TRANSPORTASI

Tersedianya akses transportasi yang baik di Kota Pontianak akan memberikan kemudahan dalam pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk peningkatan akses pangan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021, BPS, di Kota Pontianak, terdapat 2 Kelurahan dengan akses transportasi masuk dalam prioritas 3, sedangkan 27 kelurahan lainnya termasuk dalam prioritas 4. Hal ini menggambarkan di Kota Pontianak telah terdapat akses jalan yang cukup baik.

Tersedianya akses transportasi yang baik di Kota Pontianak akan memberikan kemudahan dalam pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk peningkatan akses pangan.

Tabel 3.3
Sebaran Kelurahan Dengan Akses Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
3	2	Batulayang, Siantan Hulu.
4	27	Benua Melayu Darat, Akcaya, Bangka Belitung Darat, Benua Melayu Laut, Pallima, Sungai Jawi Dalam, Sungai Bangkong, Parit Tokaya, Kota Baru, Bangka Belitung Laut, Bansir Laut, Bansir Darat, Parit Mayor, Darat Sekip, Mariana, Sungai Jawi, Sungai Jawi Luar, Siantan Hilir, Banjar Serasan, Saigon, Tanjung Hulu, Tanjung Hilir, Dalam Bugis, Tambelan Sampit, Sungai Beliang, Tengah, Siantan Tengah.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Keterjangkauan Pangan atau Akses terhadap Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Ketersediaan pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh penghidupan rumah tangga tersebut.

Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – penghasilan pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan pangan.

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Peningkatan infrastuktur jalan tidak hanya dikembangkan pada kawasan strategis dan pemukiman. Dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha di bidang pertanian dikembangkan pula jalan usaha tani dan jalan produksi yang sangat membantu petani dalam berusaha tani serta memasarkan hasil pertaniannya. Selain itu, jika suatu daerah telah memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih maka dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut memiliki jalur distribusi pangan yang normal sehingga harga pangan pun relatif terjangkau.

Dalam rangka kesinambungan program pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah tahun 2020-2024 pada bidang infrastruktur akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur transportasi, infrastruktur waterfront city, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan air bersih.

Strategi Pemerintah Kota Pontianak untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan dan sasaran diantaranya yakni :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, dengan sasaran meningkatnya sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata; meningkatnya peran koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM); meningkatnya kesempatan kerja berbagai sektor; meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan;
2. Meningkatkan ketahanan pangan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan, serta keamanan pangan.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang bergerak di bidang pangan Dengan sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang bergerak di bidang pangan.

Disamping itu dilakukan pula strategi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan tujuan dan sasaran diantaranya yakni :

1. Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas, dengan sasaran meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Menurunkan permasalahan sosial masyarakat dan sasarannya menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota Pontianak, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih tidak terlindungi dibandingkan jumlah rumah kelurahan; dan (2) jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk kelurahan.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

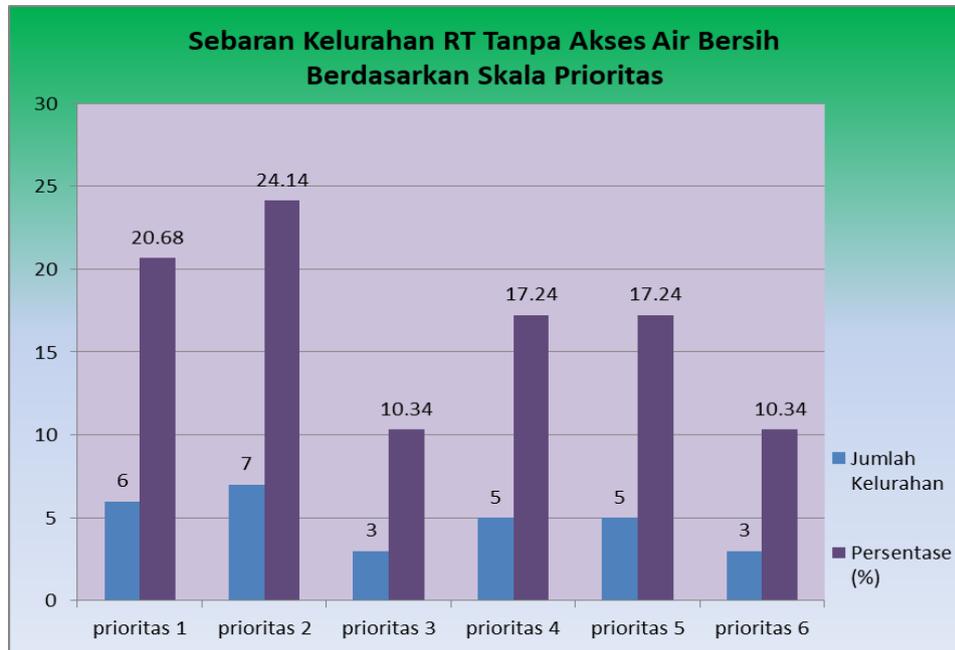
Tabel 4.1
Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga
Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
1	6	Parit Mayor, Tanjung Hilir, Dalam Bugis, Tambelan Sampit, Tengah, Bansir Laut.
2	7	Banjar Serasan, Saigon, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, Siantan Hilir, Siantan Tengah, Siantan Hulu.
3	3	Pallima, Darat Sekip, Mariana.
4	5	Benua Melayu Laut, Bangka Belitung Laut, Tanjung Hulu, Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi.
5	5	Parit Tokaya, Kota Baru, Bansir Laut, Bansir Darat, Sungai Bangkong.
6	3	Benua Melayu Darat, Akcaya, Bangka Belitung Darat.

Pada tingkat kelurahan berdasarkan data BPS tahun 2021, terdapat 6 Kelurahan yang memiliki rasio jumlah rumah tangga tanpa air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan Prioritas 1. Sebanyak 7 Kelurahan masuk prioritas 2, dan 6 Kelurahan masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program peningkatan sarana air bersih Kota Pontianak ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di Kelurahan Prioritas tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, belum semua masyarakat Kota Pontianak memanfaatkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk meningkatkan hal tersebut, telah dilakukan perluasan jangkauan instalasi air bersih PDAM, serta pemberian subsidi untuk pemasangan instalasi air bersih bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Gambar 4.1
Grafik Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga
Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas



4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

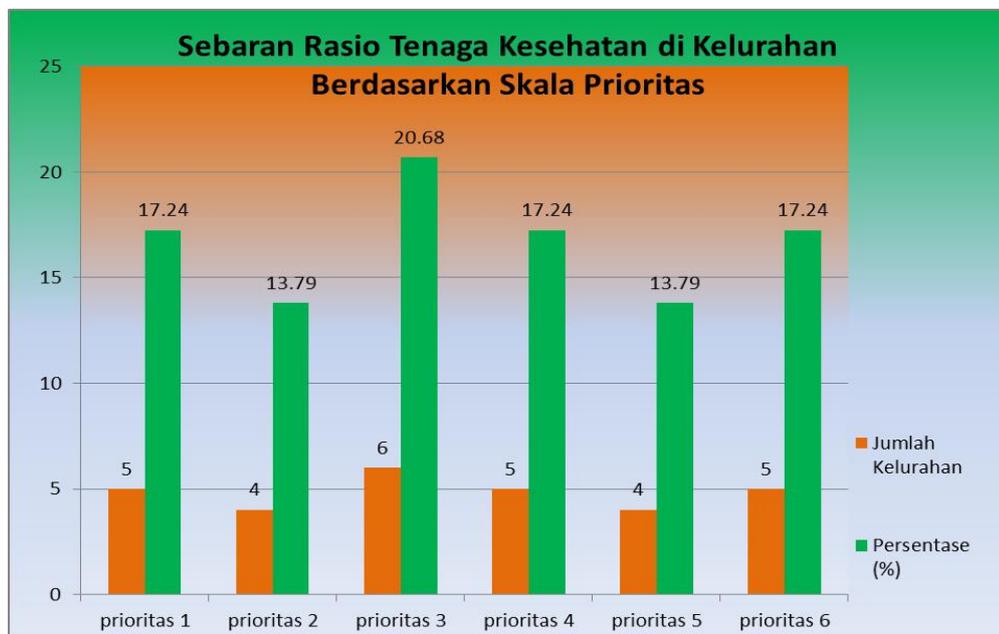
Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2
Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
1	5	Kota Baru, Tanjung Hilir, Sungai Jawi, Bansir Laut, Siantan Hilir.
2	4	Bansir Darat, Pallima, Siantan Tengah, Siantan Hulu.
3	6	Parit Tokaya, Parit Mayor, Saigon, Tanjung Hulu, Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar.
4	5	Benua Melayu Laut, Bangka Belitung Darat, Banjar Serasan, Dalam Bugis, Tengah.
5	4	Akcaya, Sungai Beliung, Sungai Bangkong, Darat Sekip.
6	5	Benua Melayu Darat, Bangka Belitung Laut, Bansir Laut, Tambelan Sampit, Marian.

Gambar 4.2
Grafik Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas



Pada tingkat kelurahan berdasarkan data data Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2021 terdapat 5 Kelurahan yang memiliki rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Prioritas 1. Sebanyak 4 Kelurahan masuk prioritas 2, dan 6 Kelurahan masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program peningkatan tenaga kesehatan Kota Pontianak ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di Kelurahan Prioritas tersebut.

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

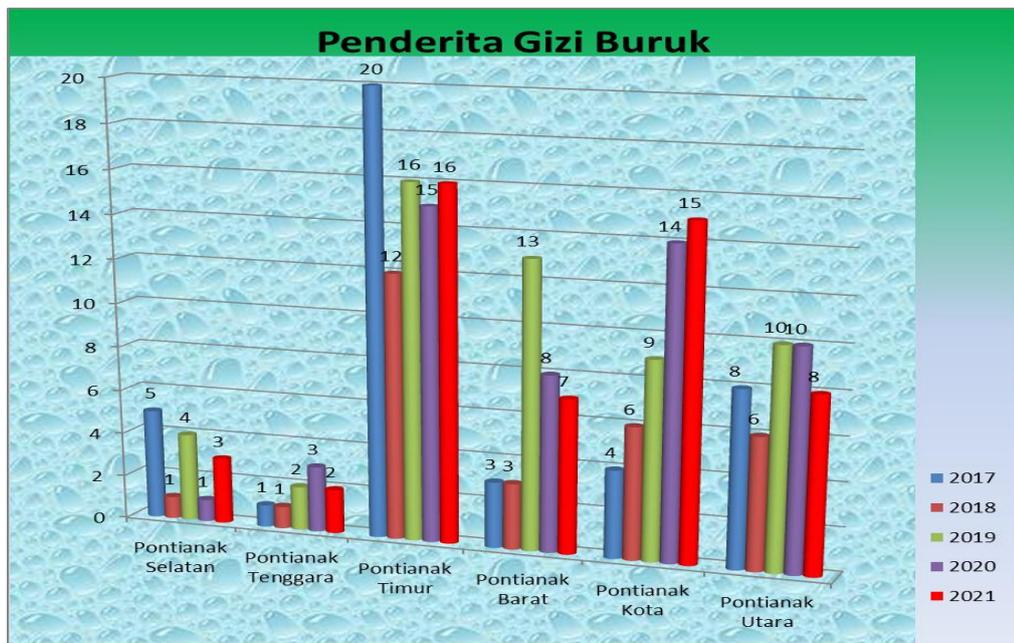
Jumlah penderita gizi buruk di Kota Pontianak pada tahun 2021 sebanyak 51 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang terbanyak ditemukan di Kecamatan Pontianak Timur (16 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Pontianak Tenggara (2 balita).

Tabel 4.3
Penderita Gizi Buruk 2017- 2021

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pontianak Selatan	5	1	4	1	3
2	Pontianak Tenggara	1	1	2	3	2
3	Pontianak Timur	20	12	16	15	16
4	Pontianak Barat	3	3	13	8	7
5	Pontianak Kota	4	6	9	14	15
6	Pontianak Utara	8	6	10	10	8
	Total	41	29	54	51	51

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2022.

Gambar 4.3
Grafik Penderita Gizi Buruk



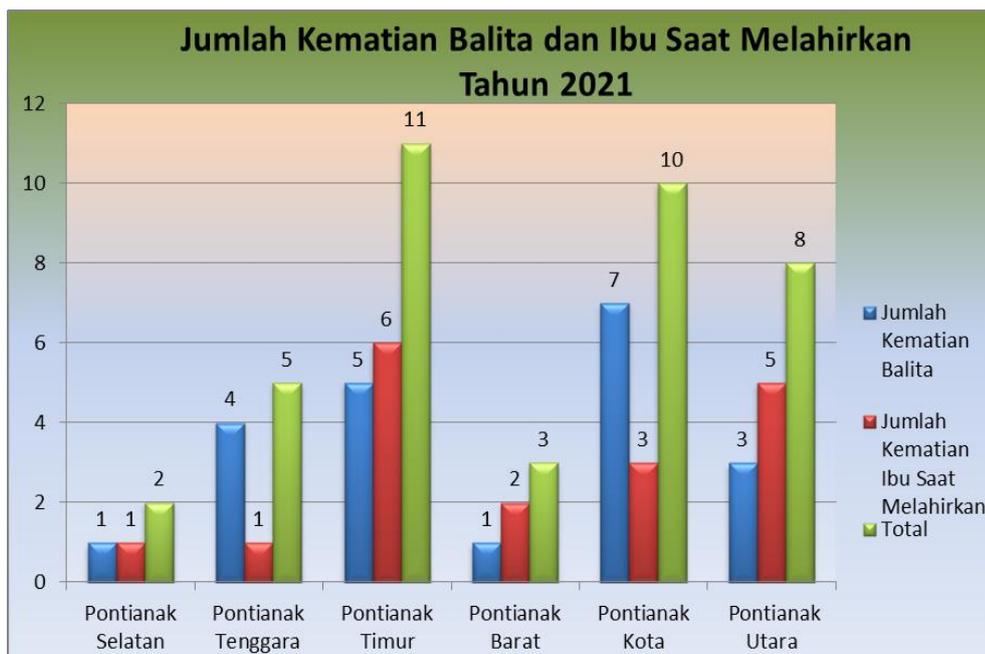
Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Pontianak tahun 2021 adalah 21 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Pontianak tahun 2021 sebanyak 18 jiwa. Angka kematian Balita dan ibu saat melahirkan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4
Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Pontianak Selatan	1	1	2
2	Pontianak Tenggara	4	1	5
3	Pontianak Timur	5	6	11
4	Pontianak Barat	1	2	3
5	Pontianak Kota	7	3	10
6	Pontianak Utara	3	5	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2021.

Gambar 4.4
Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan



Tujuan pembangunan kesehatan Kota Pontianak adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perspektif ini pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan dan program

Pemerintah Kota Pontianak berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau dapat dilihat dari penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan.

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (stunting) masih terdapat di Kota Pontianak, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi

masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.

- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganeekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
 - b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan di Kota Pontianak antara lain bertujuan untuk :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran meningkatkan kualitas kesehatan perseorangan dan masyarakat.

2. Meningkatkan kesehatan lingkungan, dengan sasaran peningkatan pola hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan peran serta dan kemandirian dalam layanan kesehatan, dengan sasaran meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam layanan kesehatan.
4. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau, dengan sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau.
5. Memastikan terlaksananya jaminan kesehatan, dengan sasaran meningkatnya kepersertaan jaminan kesehatan.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam BAB 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 5 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada BAB 2, BAB 3 dan BAB 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Ketahanan dan Kerentanan Pangan secara komposit di 29 kelurahan yang ada di Kota Pontianak, sebanyak 1 Kelurahan termasuk dalam prioritas 1, sebanyak 2 Kelurahan termasuk dalam prioritas 2, sebanyak 6 Kelurahan termasuk dalam prioritas 3, sebanyak 15 Kelurahan termasuk dalam prioritas 4, sebanyak 6 Kelurahan termasuk dalam prioritas 5, dan sebanyak 1 Kelurahan masuk dalam Prioritas 6. Hal ini menunjukkan secara agregat dari kelima indikator peta kerentanan dan ketahanan pangan yakni sarana dan prasarana penyedia pangan, penduduk dengan kesejahteraan terendah, akses penghubung yang memadai, sumber air bersih, dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap kelurahan, Kota Pontianak memiliki ketahanan pangan yang cukup baik. Meskipun demikian dari hasil analisis per indikator masih terdapat beberapa kelurahan yang

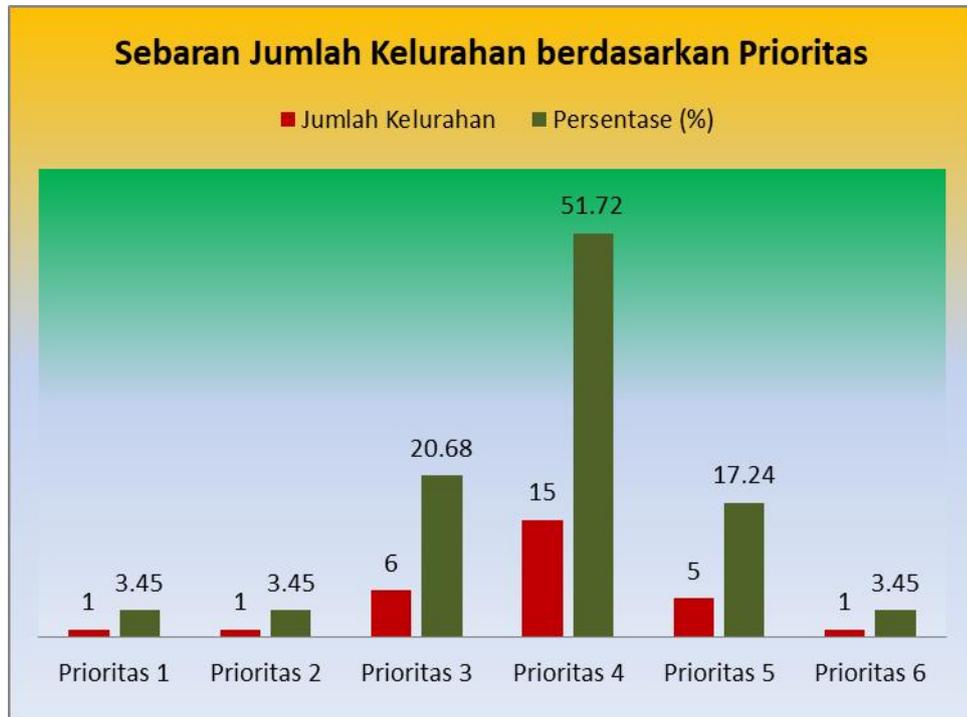
memerlukan perhatian lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan kontribusi setiap indikator tersebut terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Kota Pontianak.

Peningkatan sarana dan prasarana penyedia pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan air bersih bagi masyarakat, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan di setiap kelurahan sesuai dengan ratio penduduk dan luas wilayah perlu lebih ditingkatkan dalam upaya mencegah terjadinya kerentanan pangan serta upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Pontianak.

Tabel 5.1.
Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
1	1	Tanjung Hilir.
2	1	Batu Layang
3	6	Parit Mayor, Banjar Serasan, Dalam Bugis, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, Siantan Hulu.
4	15	Benua Melayu Laut, Parit Tokaya, Kota Baru, Bangka Belitung Laut, Bansir Darat, Saigon, Tanjung Hulu, Tambelan Sampit, Pallima, Sungai Jawi Dalam, Tengah, Mariana, Sungai Jawi, Siantan Hilir, Siantan Tengah.
5	5	Benua Melayu Darat, Akcaya, Bangka Belitung Darat, bansir Laut, Sungai Bangkong
6	1	Darat Sekip.

Gambar 5.1
Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas



Individu dan rumah tangga akan selalu menyeimbangkan kebutuhannya, baik antara kebutuhan pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain serta tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik antara pangan vs non pangan atau antara kebutuhan yang bersifat material vs non material.

Penghidupan terdiri atas kemampuan, asset (seperti toko, lahan, akses) dan aktivitas untuk mendukung penghidupan yang sehat serta minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, interaksi sosial). Penghidupan yang lestari apabila dapat mengatasi dan memulihkan keadaan apabila terjadi gejolak; memberikan manfaat kepada kehidupan lainnya, baik jangka pendek maupun panjang; serta memberikan manfaat penurunan kerentanan pangan pada masyarakat lainnya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Sistem ketahanan pangan meliputi tiga subsistem, yaitu :

- a. Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan.
- b. Keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi, dan
- c. Pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan.

Dengan mengacu pada system ketahanan pangan tersebut, penyelenggaraan pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumberdaya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kerawanan pangan dan gizi adalah masalah yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter yang berbeda yang berada diluar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator proxy dalam tiga kelompok yang berbeda tapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sangat penting untuk memahami tentang siapa dan berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, dimana mereka tinggal dan yang membuat mereka rentan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi terutama dalam merumuskan kebijakan program dan intervensi yang diperlukan baik dalam fase preventif maupun kuratif, maka diperlukan pengelolaan system kewaspadaan pangan dan gizi yang mampu menangkap indikator untuk keperluan tersebut.

Penurunan kemiskinan yang berkesinambungan dan kemajuan program-program pemerintah lainnya telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan. Namun kemajuan ini memiliki resiko stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Terdapat 3 faktor utama yang memerlukan perhatian serius yaitu :

- a. Meningkatkan akses ekonomi dan akses keuangan untuk mendapatkan pangan, terutama untuk rumah tangga miskin.
- b. Akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi.
- c. Mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat,

Kebijakan pangan dan gizi hendaknya disusun melalui pendekatan lima pilar pembangunan pangan dan gizi yang meliputi :

1. Perbaikan gizi masyarakat, melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang difokuskan pada layanan gizi efektif bagi ibu pra hamil, ibu hamil, dan anak usia dibawah dua tahun.
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui promosi produksi sayur-sayuran, buah-buahan dan komoditi yang kaya zat gizi dan membantu keluarga rawan pangan dan miskin.
3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan difokuskan pada promosi makanan jajanan sehat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi.

4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat serta merevitalisasi posyandu.
5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi, termasuk melalui peningkatan sumberdaya dan penelitian.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Berdasarkan hasil analisis secara komposit peta ketahanan dan Kerentanan Pangan, semua kelurahan yang ada di Kota Pontianak termasuk dalam Prioritas 6. Hal ini menunjukkan secara agregat dari kelima indikator peta kerentanan dan ketahanan pangan yakni sarana dan prasarana penyedia pangan, penduduk dengan kesejahteraan terendah, akses penghubung yang memadai, sumber air bersih, dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap kelurahan, Kota Pontianak memiliki ketahanan pangan yang baik. Namun demikian dari hasil analisis per indikator masih terdapat beberapa kelurahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan kontribusi setiap indikator tersebut terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Kota Pontianak.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan diprioritaskan pada kelurahan prioritas 1 sampai 3 yakni yang termasuk dalam indikator sarana dan prasarana penyedia pangan, penduduk dengan kesejahteraan terendah, sumber air bersih, dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap kelurahan.

Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1

Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kota Pontianak diarahkan pada kegiatan:

1. Mengatasi masalah ketersediaan pangan, diantaranya :
 - a. Meningkatkan kapasitas produksi per satuan luas lahan, antara lain dengan meningkatkan indeks pertanaman.
 - b. Mengembangkan potensi lahan pertanian non sawah.

- c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana khususnya tanaman pangan.
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman umbi-umbian dan sayuran.
 - e. Penguatan cadangan pangan daerah.
 - f. Peningkatan diversifikasi pangan.
 - g. Melakukan pemantauan harga dan stok pangan dalam upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan.
2. Mengatasi masalah akses pangan, diantaranya :
- a. Penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.
 - b. Pengembangan usaha kreatif, terutama di sektor informal, UMKM, padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - c. Mempermudah akses pangan, diantaranya melalui operasi pasar di titik-titik lokasi terindikasi potensi rawan pangan.
 - d. Jaringan pengaman sosial rumah tangga miskin, diantaranya efektifitas cakupan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program sosial lainnya.
3. Mengatasi masalah infrastruktur (air bersih), diantaranya :
- a. Peningkatan infrastruktur dasar air bersih, dengan memperluas jaringan air bersih PDAM.
 - b. Memberikan subsidi bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitasi pemasangan instalasi air bersih.
4. Mengatasi masalah kesehatan dan gizi, diantaranya :
- a. Memperkuat sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi.
 - b. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan gizi.
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan pangan dan gizi.
 - d. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap kelurahan.
 - e. Meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan.

Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai pusat perdagangan di Kalimantan Barat, Kota Pontianak memang merupakan tempat dimana

ketersediaan bahan pangan cukup tersedia, serta didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan pangan. Selanjutnya kemudahan fasilitas tersebut perlu didukung dengan perekonomian masyarakat yang baik pula, sehingga masyarakat memiliki daya beli dan didukung dengan harga bahan pangan yang terjangkau oleh semua kalangan. Arah pembangunan Kota Pontianak selaras dengan sasaran peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pontianak 2020-2024.

Tabel 6.2

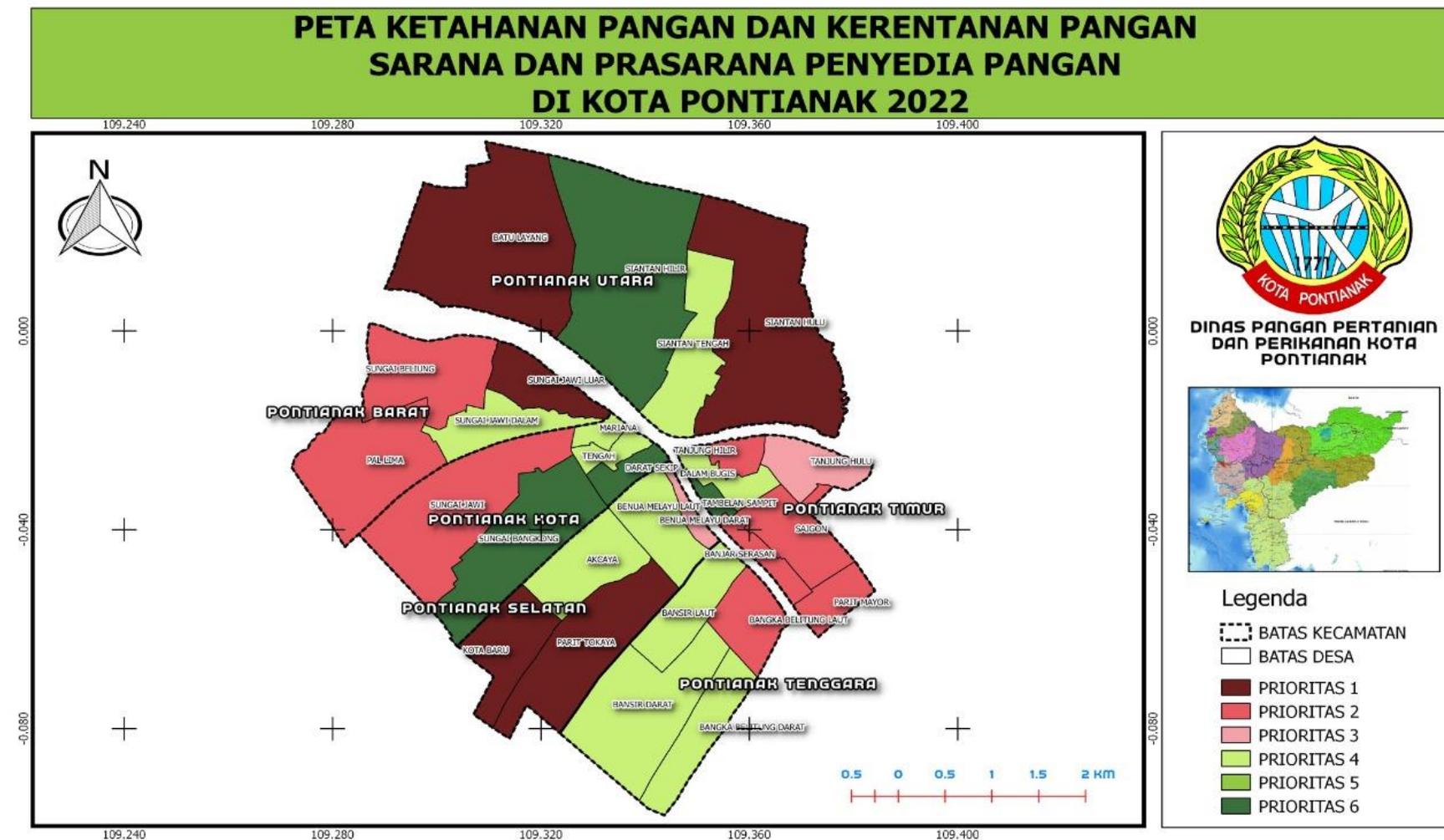
Target Kinerja RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	4,0-4,5	4,1-4,6	4,2-4,7	4,3-4,8
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	664.422	677.379	690.587	704.053	717.782
3.	Inflasi (%)	≤ 5	3 ±1	3 ±1	3 ±1	3 ±1
4.	Tingkat Pengangguran (%)	9,97	10,02-10,07	0,79-10,48	10,57-10,22	9,35-9,99
5.	Angka Kemiskinan (%)	4,90	5,00	4,80	4,70	4,60
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,53	79,95	80,40	80,85	81,30

Sumber : RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

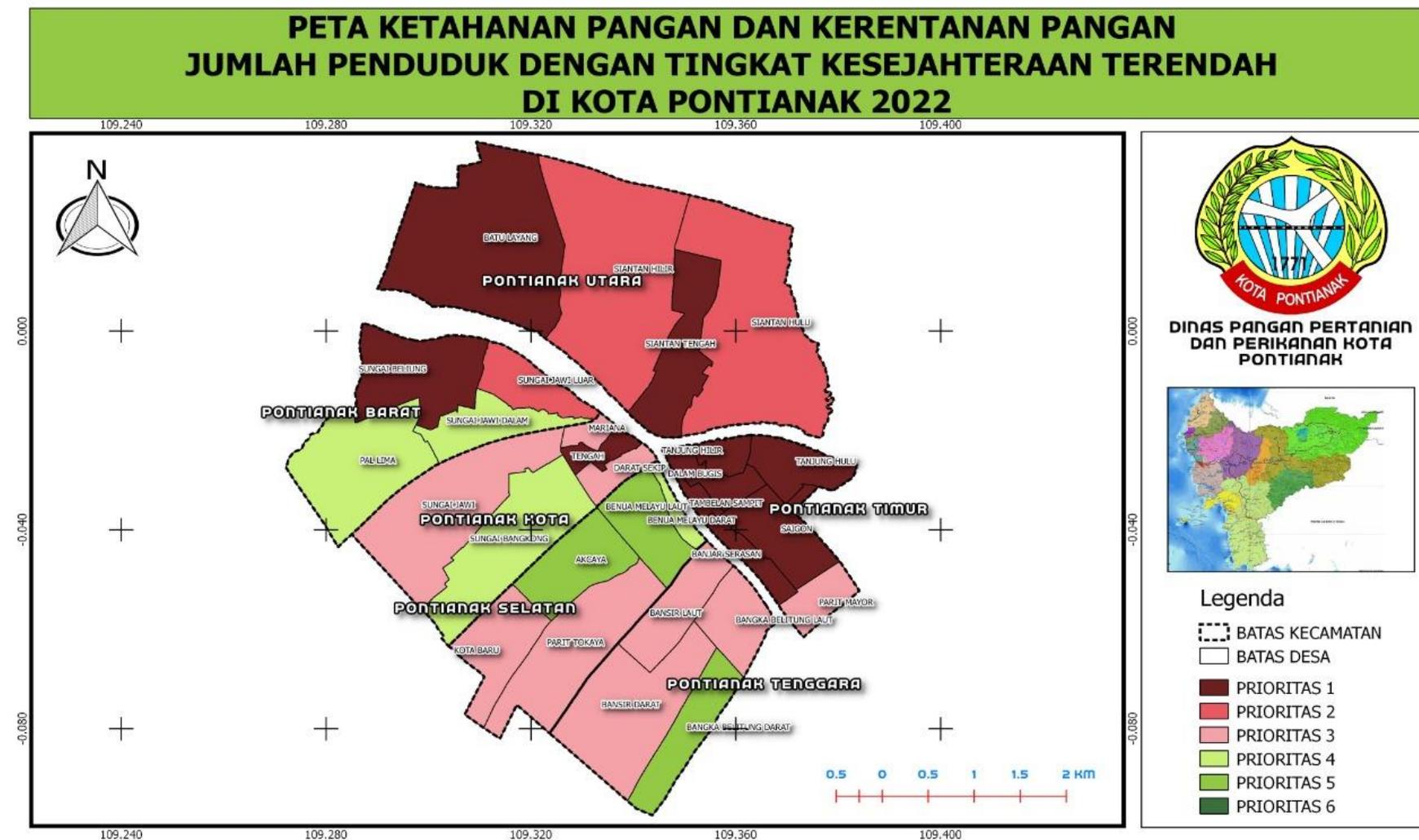
Lampiran 1

Peta Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Pontianak



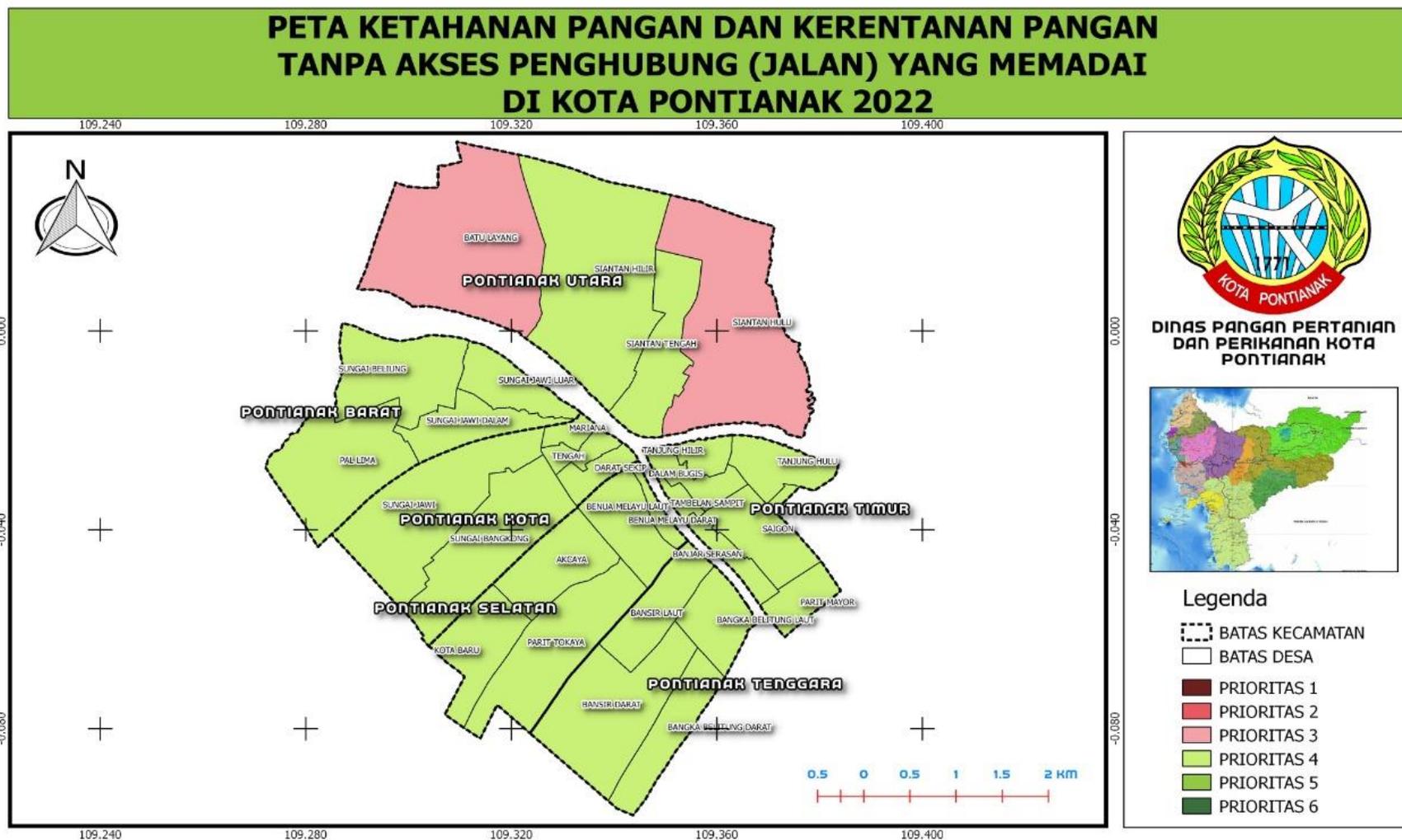
Lampiran 2

Peta Rasio Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk di Kota Pontianak



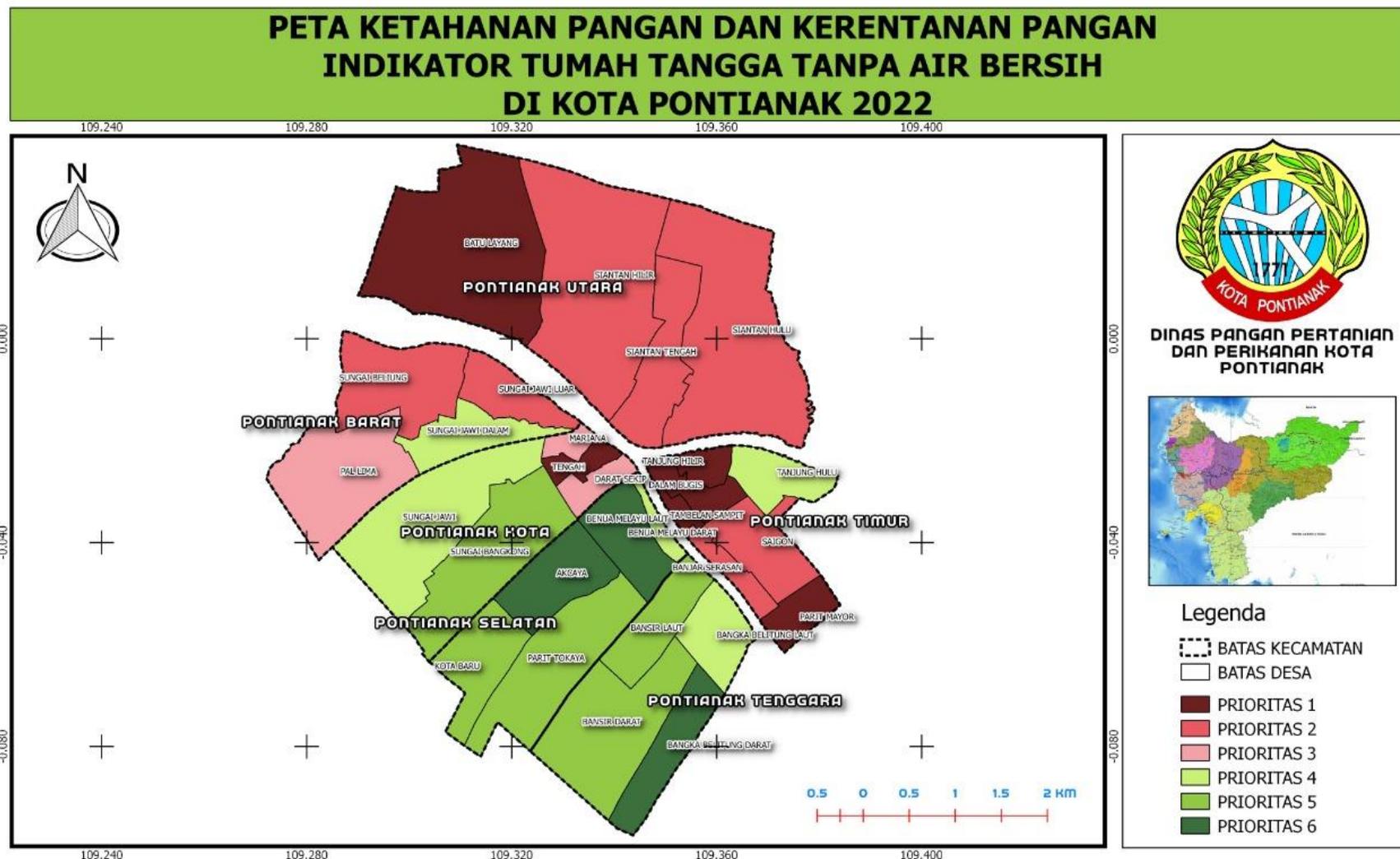
Lampiran 3

Peta Kelurahan/Kecamatan Yang Tidak Memiliki Akses Jalan Penghubung Yang Memadai di Kota Pontianak



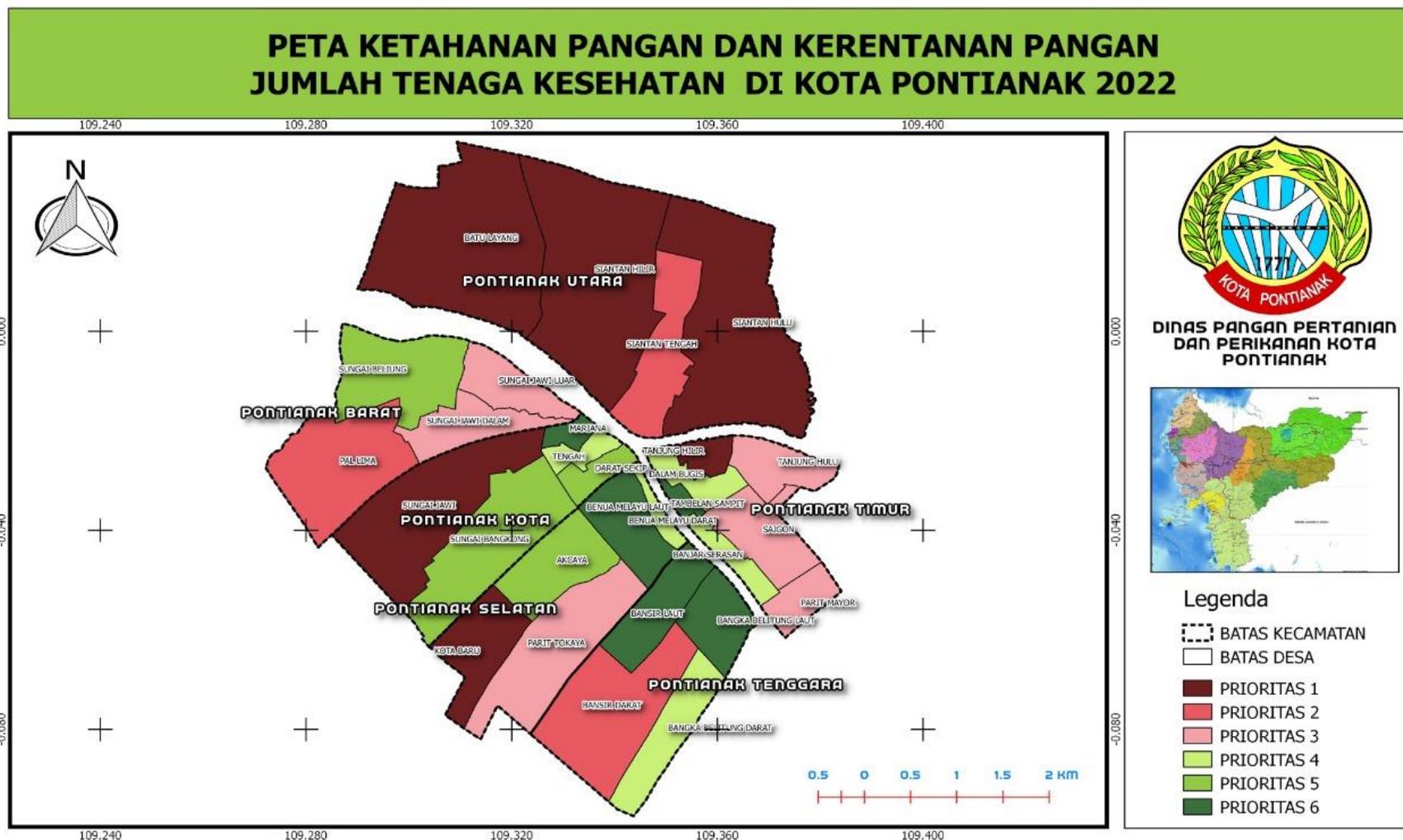
Lampiran 4

Peta Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Pontianak



Lampiran 5

Peta Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk di Kota Pontianak



Lampiran 6

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit Kota Pontianak

